

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pariwisata telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Pariwisata sendiri menurut Kodhyat (1998) diartikan sebagai suatu perjalanan dari tempat satu ke tempat yang lain, baik dilakukan secara perorangan, kelompok ataupun usaha. Dimana orang yang melakukan perjalanan wisata ini memiliki kepentingan untuk keseimbangan mental, misalnya mengurangi stress, menghibur diri dan refreshing. Melihat dari tujuannya, kegiatan pariwisata ini seringkali menjadi opsi terbaik sebagian besar penduduk dunia. Kegiatan pariwisata atau perjalanan wisata ini tak ayal menjadi kebutuhan di tengah hiruk-pikuk kesibukan aktivitas kebanyakan orang. Aktivitas pariwisata juga didukung oleh kemajuan teknologi yang memudahkan akses serta informasi tentang suatu destinasi, juga meningkatkan keinginan untuk berwisata, sehingga menjadi tren bagi sebagian besar orang untuk memposting foto dokumentasi aktivitas wisata mereka ke media sosial. (Pambudi et al., 2020).

Dengan meningkatkan animo masyarakat untuk berwisata telah menjadikan industri pariwisata tumbuh menjadi salah satu industri terbesar dan merupakan salah satu sektor ekonomi yang tumbuh paling cepat di dunia. Berbeda dengan definisi dari pariwisata, meski memiliki keterkaitan erat, industri pariwisata sendiri lebih menekankan pada pemberian fasilitas dan kenyamanan di tempat wisata tersebut. Menurut organisasi OECD dalam OECD Tourism Trends and Policies 2020 mengungkapkan bahwa pariwisata adalah sektor ekonomi yang sangat signifikan secara global dan lokal, dan memberikan prospek nyata untuk pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Sektor ini menghasilkan devisa, secara langsung mendukung

berbagai jenis pekerjaan dan bisnis dan menopang banyak komunitas lokal. Tren terbaru menunjukkan pertumbuhan kuat yang berlanjut di seluruh dunia. Lebih lanjut OECD menyatakan bahwa pariwisata global terus berkembang selama lebih enam dekade (WTO, 2019 dalam OECD2020).

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia di mana memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Indonesia juga mempunyai keanekaragaman suku bangsa, adat istiadat membentang dari sabang hingga merauke baik wisata alam maupun wisata sejarah hingga wisata religi, wisata belanja, hingga wisata kuliner. Potensi-potensi yang dimiliki Indonesia ini pun dikenali sebagai tempat dengan wisata yang populer. Pengakuan akan industri wisata yang dimiliki Indonesia diwujudkan dalam 3 penghargaan pada tahun 2016, salah satunya penghargaan sebagai wisata halal dunia. Peran sektor pariwisata semakin pesat dengan adanya perbaikan dalam struktur perekonomian Indonesia (Made & Kristina, 2020).

Wisata Indonesia pun menjadi salah satu sektor yang mampu memberikan pendapatan cukup besar untuk ekonomi Indonesia termasuk di dalamnya menerapkan lapangan pekerjaan yang menambah devisa negara. Sektor pariwisata Indonesia berada di urutan ke 4 (empat) penyumbang devisa negara setelah non-migas. Peningkatan sektor industri pariwisata diharapkan juga dapat sejalan dengan peningkatan kelola usaha lokal serta daya saingnya di sektor tersebut, sehingga dalam implementasinya dibutuhkan pembinaan pariwisata.

Dari sekian banyak pulau serta wilayah Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu dari sekian banyak titik-titik area dengan potensi alam dan budaya. Terlihat dari namanya, Yogyakarta dilabeli dengan julukan Daerah Istimewa yang sarat akan budaya dan ramah pariwisata

sehingga tak heran dijadikan sebagai salah satu destinasi pariwisata andalan Indonesia. Oleh karena itu, D.I. Yogyakarta diharapkan dapat berhasil menarik minat penduduk dunia untuk berkunjung menikmati keindahan dan potensi wisata yang ada. Perkembangan pariwisata di Daerah Istimewa ini juga telah memberikan pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat lokal sehingga pariwisata di Yogyakarta menjadi sektor andalan dibandingkan sektor lainnya.

Potensi wisata yang ada di Yogyakarta, mulai dari ruang lingkup kota, kabupaten, hingga desa, mulai dipromosikan demi meningkatkan pertumbuhan sektor lapangan kerja yang kemudian berpengaruh pada peningkatan pendapatan daerah, serta secara langsung mendukung perkembangan usaha kecil di cakupan wilayah masing-masing. D.I Yogyakarta sendiri dikenali dengan wisata budaya di sepanjang titik nol hingga jalan legendarinya yakni, Malioboro sehingga tak heran Kota Jogja menjadi wisata destinasi paling populer di provinsi ini. Namun, potensi wisata yang dimiliki D.I. Yogyakarta tak sebatas itu saja, rupanya masih banyak yang perlu dijelajahi baik potensi wisata sekitar Kabupaten Sleman, Bantul, Gunung Kidul, hingga Kulon Progo. Kabupaten Kulon Progo yang terletak paling barat di provinsi D.I Yogyakarta ini jarang sekali disebut-sebut oleh wisatawan, padahal daerah tersebut juga memiliki potensi daya tarik wisata seperti wilayah lain di provinsi Yogyakarta. Pengertian daya tarik wisata sendiri ialah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan (Muksin, 2016).

Kulon Progo memiliki cakupan wilayah pedesaan yang kaya akan potensi daya tarik wisatanya. Desa-desanya tersebut secara alamiah dibekali oleh potensi wisata alam yang dapat menarik wisatawan untuk datang berkunjung sehingga perlu dikembangkan sebagai desa wisata. Desa wisata sendiri merupakan upaya pengembangan suatu wilayah desa yang pada dasarnya tidak merubah apa yang sudah ada sebelumnya akan tetapi lebih cenderung kepada pengembangan potensi desa yang ada dengan melakukan pemanfaatan kemampuan unsur- unsur yang ada di dalam desa yang berfungsi sebagai atribut produk wisata dalam skala yang kecil menjadi rangkaian aktivitas atau kegiatan pariwisata dan mampu menyediakan serta memenuhi serangkaian kebutuhan perjalanan wisata baik dari aspek daya tarik maupun sebagai fasilitas pendukung (Ngaisah & Nita, 2021). Pengembangan Desa Wisata merupakan suatu upaya yang digunakan untuk memanfaatkan sumberdaya alam dengan sebaik-baiknya untuk menarik minat wisatawan sehingga dapat menguntungkan dan dapat mensejahterakan masyarakat di sekitarnya (Ngaisah & Nita, 2021). Meskipun banyak sekali desa-desa di Kulon Progo yang berpotensi menjadi desa wisata, namun, untuk menjadi sebuah tujuan wisata, terdapat tiga kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh suatu daerah terlebih dahulu, antara lain memiliki atraksi atau objek menarik, mudah dicapai dengan kendaraan, dan menyediakan tempat tinggal sementara.

Salah satu desa yang memiliki keistimewaan akan wisata alam, budaya, dan agro di Kabupaten Kulon Progo adalah Desa Wisata Nginggo yang terletak di Desa Pagerharjo di Kecamatan Samigaluh. Desa wisata Nginggo masuk dalam ketiga kebutuhan utama yang dijelaskan di atas di mana desa wisata ini menawarkan objek wisata alam perkebunan teh dan air terjun Curug Watu Jonggol yang terletak di satu dusun dengan keberadaan perkebunan teh.

Desa Nglingo diresmikan pertama kali oleh Pemerintah D.I Yogyakarta pada tahun 2004 dan telah menjalankan aktvitasnya menerima wisatawan selama bertahun-tahun. Namun, tepatnya pada awal tahun 2020 di mana pandemi Covid-19 tersebar ke seluruh dunia, kegiatan wisata di Desa Wisata Nglingo ini pun harus terhenti sementara. Hal ini juga tak terlepas dari penyebaran virus yang sangat cepat melalui melalui tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin sehingga harus diupayakan berbagai cara untuk setidaknya meminimalisir penyebaran rantai Covid-19 antara lain dengan; social distancing (pembatasan sosial), lockdown (karantina wilayah) sertawork from home (bekerja/beraktifitas dari rumah). Adanya kebijakan-kebijakan tersebut serta ketakutan masyarakat akan virus Covid-19 telah menyebabkan pengurangan kegiatan wisata masyarakat dunia secara signifikan sehingga hal ini tentu berdampak pada menurunnya bahkan tidak adanya kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Nglingo selama pandemi. Hal ini memberikan pukulan yang sangat keras bagi industri pariwisata secara global termasuk industri pariwisata di Yogyakarta (Gratiano, 2021).

Melihat kondisi tersebut sangat perlu dilakukan upaya-upaya untuk memulihkan kembali sektor pariwisata khususnya di Desa wisata Nglingo dalam upaya memulihkan sektor industri wisata desa tersebut yang mana akan berdampak pada pemulihan perekonomian masyarakat sekitarnya.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dibuat suatu rumusan masalah sebagai berikut: **“Bagaimana Pemulihan Pariwisata Desa Wisata Nglingo Pada Masa Pandemi Covid-19 Desa Panerharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo menuju next normal?”**

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan bentuk bentuk pemulihan pariwisata masyarakat yang dilakukan oleh Desa Wisata Nglingo Kabupaten Kulon Progo
2. Menjelaskan mengenai pemulihan apa saja yang dilakukan di Desa Wisata Nglingo Kabupaten Kulon Progo

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1. Manfaat Teoritis
  - a) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada ilmu pengetahuan yaitu di dalam dibidang pariwisata untuk pemulihan pariwisata, khususnya desa wisata.
  - b) Sebagai tambahan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi sebagai bahan rekomendasi atau acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk upaya pemulihan potensi alam dikawasan desa wisata nglingo agar nantinya dapat dimaksimalkan pengembangan masyarakat berbasis poetensi alam dengan dikembangkannya potensi yang ada di Desa

Selain dapat juga dijadikan acuan untuk Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, nantinya peneliti mampu memberikan kontribusi untuk pemulihan selanjutnya dan menghasilkan informasi pertimbangan oleh masyarakat setempat dan nantinya supaya bisa

berkerja sama dengan Dinas Pariwisata, sebagai acuan refensi bagi penelitian sebelumnya yang tertarik dengan pengambilan mengenai pemulihan pariwisata masyarakat Desa Wisata Nglinggo Kabupaten Kulon progo.

### E. Tinjauan Pustaka

Adapun penulis melakukan tinjauan pustaka atau *litertur review* yang bersumber dari penelitian–penelitian sebelumnya di mana penelitan tersebut berkaitan langsung dengan penelitian ini, antara lain:

**Tabel 1. Daftar tinjauan pustaka penelitian sebelumnya**

No	Judul	Penulis / Tahun	Hasil Penelitian
1	Strategi Pemulihan Ekonomi Sektor Pariwisata Pasca Covid-19	(Pambudi et al., 2020)	Penelitian ini memberikan usulan kebijakan dalam sektor pariwisata, dalam jangka pendek ataupun jangka menengah sebelum dan sesudah pandemi covid-19 masuk di Indonesia, Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk kajian perencanaan pembangunan pariwisata yang ditekankan dalam hal UMKM, dan hal-hal yang meningkatkan strategi kolaborasi optimal dalam penanganan covid-19
2	Peran Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata Era New Normal di	(Gratiano, 2021)	Hasil penelitian ini menunjukan upaya maksimal untuk terus malakukan promosi dan pengembangan promosi dan pengembangan pariwisata DIY sebagai upaya pemulihan dan adaptasi ditengah situasi pandemi ini menggunakan berbagai kebijakan pemerinta seperti pemanfaatn teknologi informasi dalam pengembangan

	Daerah Istimewa Yogyakarta Melelui Aplikasi Visting Jogja		sektor pariwisata dalam bentuk e-tourism untuk pemulihan pariwisata, Perlu adanya kerjasama dengan semua pihak secara sinergi dan kolaborasi dalam upaya melakukan promosi bersama
3	Upaya Pemulihan Sektor Pariwisata di Tengah Pandemi Covid-19	<i>(Sutrisnawati, Gusti, Nyoman, &amp; Ardiasa, 2020)</i>	Hasil penelitian ini mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh covid-19 terhadap sektor pariwisata di Bali dengan dilakukannya untuk pemulihan pariwisata dalam rangka pemulihan perekonomian masyarakat Bali, kordinasi dengan menjalin kerjasama pada pihak-pihak dalam upaya pemulihan sektor pariwisata di Bali mempromosikan kepada dunia bahwa bali sudah aman dan siap untuk dikunjungi wisatawan
4	Potensi Pemulihan Parwisata Halal di Ponorogo (Analisa Strategi Pada Masa Pandemi Covid-19)	<i>(Pustaka, 2020)</i>	Penelitian ini menggunakan strategi jangka pendek lebih mengedepankan dukungan pemerintah daerah, mulai dukungan finansial dan kebijakan yang mendukung, potensi yang dikembangkan oleh kabupaten ponorogo sebagai tujuan wisata halal sangat bagus, tetapi saat pandemi ini kegiatan pariwisata menurun drastis.
5	Dampak Pandemi Covid-19 dan Kesiapan Desa Wisata	<i>(Ui et al., 2020)</i>	Penelitian ini dilakukan melalui pengabdian KKN-tematik terhadap pengembangan desa wisata melalui recovery dan pendampingan maupun sosialisasi dalam pengelola desa wisata, kurangnya dukungan dari

	Menghadapi Tatatanan Hidup Baru		pemerintah dalam memperhatikan kesehatan masyarakat di kawasan wisata maupun masyarakat umum, dengan dibukanya kembali desa wisata wisatawan diharapkan dapat tetap memperhatikan protokol kesehatan.
6	Pemulihan Fungsi Alam Pariwisata ditengah Pandemi Covid- 19	(Ketut et al., 2020)	Hasil penelitian ini menunjukan pemulihan fungsi alam yang sebelumnya tereksplotasi manusia, yang berakibat pada perkonomian wisata di Bali, penelitian ini mengkaji bagaimana tingkat pemulihan fungsi alam pariwisata pada masa covid-19.
7	Upaya Pemulihan Industri Pariwisata Dalam Situasi Pandemi Covid- 19	(No&Anggarini, 2021)	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya pemulihan sektor pariwisata menggunakan 3 (tiga) strategi yang diterapkan untuk mempercepat pemulihan pariwisata yakni melakukan inovasi segi infrastruktur, budaya, kuliner dan hal yang berikaran dengan pariwisata dan ekonomi kreatif, membiasakan beradaptasi dengan kondisi pandemi covid-19 dengan meningkatkan penerapan 'CHSE' <i>Cleanliness</i> (kebersihan), <i>health</i> (kesehatan), <i>safety</i> (keamanan), dan <i>enviroment</i> (ramah lingkungan), dan yang ketiga melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan sektor pariwisata. Masih ada kendala yang dihadapi pelaku UMKM dan pekerja informal sektor pariwisata, keterbatasan dalam menggunakan teknologi oleh pekerja informal menjadikan ini sebagai solusi bagaimana malakukan upaya untuk menyelamatkan

			sektor pariwisata.
8	Strategi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi Pada Masa Pandemi Covid-19	( <i>D. Marlina Verawati, A. Achsa, 2021</i> )	Penelitian ini menunjukan strategi pengembangan pariwisata pada masa pandemi melalui tindakan dan sasaran yang dilakukakan secara opsional dengan penyusunan program kegiatan organisasi, penelitian ini sudah memberikan beberapa kunci strategi yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk mengembangkan atau berkolaborasi dalam pengembangan pariwisata guna pemulihan wisata saat pandemi.
9	Rekomendasi Kebijakan Pemulihan Pariwisata Pasca Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Bandung	( <i>Herdiana &amp; Padjajaran, 2020</i> )	Penelitian ini menunjukan perencanaan kebijakan pemulihan pariwisata yang direkomendasikan dengan melakukan optimalisasi dari kedua sektor utama pariwisata. Perlu melakukan komunikasi dan koordinasi dalam penyusunan instrumen kebijakan pemulihan pariwisata covid-19 secara eksternal maupun internal.
10	Strategi Pemulihan Pariwisata Pasca Penanganan Pandemi Covid-19 di Provinsi Bali	( <i>D. Marlina Verawati, A. Achsa, 2021</i> )	Hasil penelitian ini menunjukan strategi yang digunakan sudah dapat menarik wisatawan kembali untuk berwisata, strategi pemulihan pariwisata sudah dapat melakukan peningkatan yang saat ini mengalami peningkatan.

Dari beberapa penelitian yang diatas tabel ini pembahasan mengenai pemulihan pariwisata saat pandemi covid-19, penelitian ini berbeda dari penelelitian sebelumnya. karena penelitian ini akan membahas bagaimana pemulihan pariwisata yang dilakukan oleh desa wisata yakni mengambil kasus desa nglinggo yang dimana tersebut merupakan desa yang banyak diminati oleh wisatawan.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Pariwisata**

Kata “pariwisata” berasal dari dua suku kata, yaitu pari dan wisata. Pari berarti banyak, berkali-kali dan berputar-putar, sedangkan wisata berarti perjalanan atau bepergian. Jadi pariwisata berarti perjalanan atau berpergian yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling. Pariwisata adalah padanan kata Bahasa Indonesia untuk istilah tourism dalam Bahasa Inggris (Muljadi, 2009). Menurut Suwanto (1997), istilah pariwisata berhubungan erat dengan perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang di luar tempatnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjalanan wisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin tahu. Dapat juga karena kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan olah raga untuk kesehatan, konvensi, keagamaan, dan keperluan usaha yang lainnya.

Menurut Suwanto dalam (Jayanti, 2019) pariwisata adalah suatu proses perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya yang bersifat sementara dan di luar tempat tinggalnya, baik perorangan atau kelompok. Kemudian

pariwisata juga merupakan industri baru dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, bahkan juga dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara cepat. Sektor pariwisata dalam (Ningsih, 2013) juga tidak sedikit memberikan sumbangannya terhadap pendapatan daerah. Pariwisata adalah bagian penting dalam pembangunan ekonomi karena sektor pariwisata memiliki keterkaitan pada hampir semua subsektor ekonomi. Sehingga pariwisata memberikan kontribusi pada perekonomian makro di Jawa Timur dan perekonomian di Indonesia (Puspitasari, Saleh and Yunitasari, 2018).

World Tourism Organization (WTO) dan International Union of Office Travel Organization (IUOTO) mendefinisikan wisatawan sebagai setiap pengunjung yang tinggal paling sedikit 24 jam, akan tetapi tidak lebih dari 6 (enam) bulan di tempat yang dikunjunginya dengan maksud kunjungan antara lain: (1) berlibur, rekreasi, dan olahraga, (2) bisnis, mengunjungi teman dan keluarga, misi, menghadiri pertemuan, konferensi, kunjungan dengan alasan kesehatan, belajar, atau kegiatan keagamaan. Adapun Badan Pusat Statistik mendefinisikan pelancong sebagai setiap pengunjung yang tinggal kurang dari 24 jam di tempat yang dikunjunginya.

Pariwisata berdasarkan pengertian World Tourism and Travel Council (WTCC) adalah merupakan seluruh kegiatan orang yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di suatu tempat di luar lingkungan kesehariannya dalam jangka waktu tidak lebih dari setahun untuk bersantai, bisnis dan lainnya. Adapun Pendit dalam Baruddin (2011) menyatakan bahwa pariwisata terdiri dari kegiatan-kegiatan seperti wisata budaya, wisata kesehatan, wisata kuliner, wisata pendidikan, wisata keagamaan, wisata bisnis, wisata industri, wisata konvensi, wisata politik, wisata sosial, wisata bulan madu, wisata cagar alam, wisata penelitian, wisata bahari, wisata cagar alam, dan wisata

petualangan. Pariwisata sudah diakui sebagai industri besar, dapat dilihat dari sumbangan terhadap pendapatan dan penyerapan tenaga kerja (Pitana & Gayatri, 2005), sedangkan dalam menjalankan kegiatannya, pariwisata dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi penawaran dan sisi permintaan. Baik sisi permintaan maupun sisi penawaran merupakan ruang lingkup dari kegiatan ekonomi pariwisata yang saling berinteraksi satu sama lain.

## **2. Desa Wisata dalam Konsep Pengembangan Industri Pariwisata**

Pariwisata memiliki keterkaitan erat dengan konsep industri pariwisata yang sebuah bidang usaha di mana menghasilkan berbagai jasa dan barang yang dibutuhkan oleh mereka yang melakukan perjalanan wisata. Menurut para ahli, industri pariwisata adalah kumpulan usaha yang bertujuan menghasilkan barang – jasa demi memenuhi kebutuhan dan kenyamanan wisatawan (Deepublish, 2020). Menurut UNWTO (United Nations World Tourism Organization) dalam the International Recommendations for Tourism Statistics 2008, Industri Pariwisata meliputi; Objek wisata, akomodasi untuk pengunjung, kegiatan layanan makanan dan minuman, angkutan penumpang, agen perjalanan wisata dan kegiatan reservasi lainnya, kegiatan budaya, kegiatan olahraga dan hiburan. Melalui industri wisata, sebuah destinasi wisata akan kerap dikunjungi dikarenakan kondisi lingkungan yang memadai, infrastruktur yang mumpuni, serta memiliki nilai budaya sebagai objek (dalam Tjahjadi Michael Dkk 2016).

Komponen industri wisata tersebut pula dibutuhkan dalam konsep pengembangan pariwisata, dimana kegiatan industri wisata dapat secara langsung mempengaruhi nilai permintaan. Perencanaan dan pengembangan pariwisata merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan menuju ketataran nilai yang lebih tinggi dengan cara melakukan penyesuaian dan

koreksi berdasar pada hasil monitoring dan evaluasi serta umpan balik implementasi rencana sebelumnya yang merupakan dasar kebijaksanaan dan merupakan misi yang harus dikembangkan. Perencanaan dan pengembangan pariwisata bukanlah system yang berdiri sendiri, melainkan terkait erat dengan sistem perencanaan pembangunan yang lain secara inter sektoral dan inter regional (DPRD Talaud, 2020)

Dalam upaya pengembangan Pariwisata, perlu diketahui bahwa potensi-potensi wisata yang terdapat dalam suatu wilayah dapat dikategorikan sebagai destinasi wisata apabila memiliki beberapa komponen, yang menurut Jackson (Gde Pitana, 2005: 99) adalah sebagai berikut; (a) menarik untuk wisatawan, (b) memiliki fasilitas dan atraksi, (c) lokasi geografis, (d) memiliki jalur transportasi, (e) memiliki stabilitas politik, (f) lingkungannya sehat, (g) tidak dalam larangan atau batasan pemerintah. Perlu diketahui bahwa wisatawan melakukan perjalanan wisata dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menjadi daya tarik yang membuat seseorang rela melakukan perjalanan yang jauh dan menghabiskan dana cukup besar.

Suatu daerah harus memiliki potensi daya tarik yang besar agar para wisatawan mau menjadikan tempat tersebut sebagai destinasi wisata. Salah satu poin yang disebutkan Jackson (2005) di atas yang menjadi suatu daya tarik terbesar pada suatu destinasi wisata adalah sebuah atraksi, baik itu berupa pertunjukan kesenian, rekreasi, atau penyajian suatu paket kebudayaan lokal yang khas dan dilestarikan. Paket kebudayaan lokal yang khas dan dilestarikan tersebut dapat menjadi atraksi atau penarik perhatian wisatawan disebut dengan konsep ‘desa wisata’ yang di mana bisa berupa keseluruhan aktifitas keseharian penduduk setempat beserta *setting* fisik

lokasi desa yang memungkinkan terjadinya interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat.

Desa wisata, menurut Nuryanti (Dalam Yuliati & Suwandono, 2016) merupakan wujud kombinasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang dikemas dalam suatu pola kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku sehingga menjadikan desa tersebut sebagai tujuan wisata. Desa wisata juga merupakan bentuk industri pariwisata yang berupa kegiatan perjalanan wisata identik meliputi sejumlah kegiatan yang bersifat mendorong wisatawan sebagai konsumen agar menggunakan produk yang diproduksi oleh penduduk dari desa wisata tersebut yang terdiri dari angkutan wisata, objek wisata, ataupun akomodasi pariwisata berupa penginapan atau tempat tinggal sementara.

Desa wisata adalah sebuah wujud kombinasi antara akomodasi, atraksi, dan sarana pendukung yang dikenalkan dalam sebuah tata kehidupan masyarakat yang menjadi satu dengan aturan dan tradisi yang berlaku. Sebuah desa bisa disebut desa wisata apabila desa tersebut memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan, sebuah tradisi yang dilestarikan warga setempat, serta kebudayaan yang menjadi ciri khas, aksesibilitas dan sarana prasarana yang mendukung program desa wisata, keamanan yang terjamin, terjaganya ketertiban, dan kebersihan. Dasar dalam pengembangan desa wisata ialah pemahaman tentang karakter dan kemampuan elemen yang ada dalam desa, seperti: kondisi lingkungan dan alam, sosial budaya, ekonomi masyarakat, struktur tata letak, aspek historis, budaya masyarakat dan bangunan, termasuk *indigenous knowledge* (pengetahuan dan kemampuan lokal) yang dimiliki masyarakat (Karangasem, dalam Yusuf A. Hilman, Dkk 2018).

Dalam proses pengembangan desa wisata, masyarakat sekitar dijadikan sebagai subyek aktif, artinya lingkungan sekitar dan kehidupan sosial masyarakat di desa tersebut dijadikan sebagai tujuan wisata. Masyarakat juga berperan sebagai agen promosi wisata serta inovator dalam memberikan ide gagasan pengembangan desa wisata. Menurut I. Pitana (N. Nurhajati 2017), pembangunan dan pengembangan pariwisata secara langsung akan melibatkan masyarakat, sehingga dapat memberikan berbagai pengaruh kepada masyarakat setempat, baik berupa pengaruh positif maupun negatif. Pemanfaatan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar desa wisata yang diorganisir secara maksimal, akan memberikan dampak terhadap masyarakat sekitar. Hasil yang diperoleh dari kegiatan desa wisata akan dikembalikan kepada masyarakat sekitar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan, konsep desa wisata akan menjadikan suatu desa menjaga kelestarian alam dan lingkungan, budaya, serta tradisi desa tersebut.

Keterlibatan masyarakat sekitar dalam proses pengembangan desa wisata juga sebagai kegiatan pemberdayagunaan masyarakat dalam membangun desa secara bersama-sama. Motivasi desentralisasi memberikan kebebasan bagi warga untuk mengatur dan mengelola pariwisata di daerahnya merupakan metode untuk menciptakan pariwisata yang berbasis kelompok sosial masyarakat. Raharjana (Dalam Yusuf A. Hilman dkk, 2018). Tujuan dari pengembangan desa wisata adalah untuk melestarikan lingkungan alam dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah sehingga dengan mengimplementasikan konsep desa wisata ini menjadi salah satu wujud pariwisata yang ramah terhadap lingkungan di waktu mendatang (Juwita dalam Theofilus Retmana P, 2013). Dengan berkembangnya desa

wisata, akan memacu laju perkembangan industri pariwisata di Kabupaten Kulon Progo. Untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama mengunjungi destinasi wisata diperlukan kehadiran industri pariwisata sebagai penunjang kegiatan. Dalam konsep desa wisata, industri pariwisata yang mayoritas tersedia adalah restoran atau rumah makan, jasa transportasi, hotel atau penginapan.

Sehingga dengan pengembangan konsep desa wisata sebagai tujuan wisata diharapkan dapat mewujudkan beberapa tujuan berikut;

1. Meningkatnya pertumbuhan urbanisasi sebagai dampak adanya pembangunan prasarana dan sarana wisata di sekitar wilayah atau daerah tujuan desa wisata.
2. Meningkatkan perkembangan industri pariwisata yang berhubungan dengan pelayanan wisatawan, seperti perusahaan transportasi, perhotelan dan penginapan, restoran dan rumah makan, kesenian lokal, souvenir dan lain-lain di daerah sekitar lokasi desa wisata.
3. Menambah serta melestarikan hasil kebudayaan dikarenakan meningkatnya tingkat konsumsi oleh wisatawan, seperti munculnya istilah kebudayaan komersil untuk memenuhi keperluan wisatawan.
4. Pemerataan pendapatan masyarakat desa wisata.
5. Jalan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan membantu pemasukan devisa negara.
6. Menimbulkan multiplier effect pada negara-negara “Tourism Receiving Country”.

### **3. Bencana**

Bencana Menurut United Nations Development Programme (dalam Febri:2017), bencana merupakan suatu gangguan yang cukup serius bagi masyarakat karena menimbulkan kerugian terhadap manusia, material serta lingkungan, yang akibatnya melebihi kemampuan masyarakat korban tertimpa bencana, dan dalam penanggulangannya hanya berasal dari sumber daya masyarakat itu sendiri. Klasifikasi bencana dibedakan berdasarkan cepat lambatnya serangan bencana atau berdasarkan penyebab dari terjadinya bencana.

Menurut Priambodo (2013), bencana merupakan sebuah kejadian alam yang disebabkan oleh perbuatan manusia ataupun gabungan dari keduanya yang terjadi secara mendadak sehingga berdampak negatif untuk kehidupan makhluk hidup. Bencana adalah suatu peristiwa, entah karena perbuatan manusia atau alam, mendadak atau berangsur yang menyebabkan kerugian yang meluas terhadap kehidupan, materi dan lingkungan sedemikian rupa melebihi kemampuan dari masyarakat korban untuk menanggulangi dengan menggunakan sumber dayanya sendiri (Nasution:2005). Senada dengan definisi tersebut dijelaskan oleh Surono (2003) bencana adalah peristiwa yang diakibatkan oleh alam dan atau manusia yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan harta benda, kerusakan lingkungan hidup, sarana dan prasarana, fasilitas umum serta mengganggu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Menurut para ahli penanggulangan bencana, bencana dapat diuraikan menjadi beberapa jenis. Pertama, bencana alam. Bencana alam adalah segala sesuatu yang sumber, perilaku penyebab dan faktor serta pengaruhnya dari alam, seperti: banjir, gempa bumi, erupsi Gunung Merapi, tsunami, angin

topan, badai, kekeringan, tanah longsor. Kedua, bencana non alam. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh non alam, seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, dan wabah penyakit. Ketiga, bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa manusia, seperti konflik sosial antar kelompok dan komunitas masyarakat, dan teror.

Menurut Kusumasari (2014) penanggulangan bencana meliputi 5 tahapan umum:

1. Tahap pertama, Prediction (prediksi): dalam tahap ini kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan dilakukan. Namun terlebih dulu langkah-langkah non-struktural diambil untuk memastikan respons yang efektif terhadap dampak bahaya bencana. Termasuk di sini adalah dikeluarkannya peringatan dini yang tepat waktu dan efektif serta evakuasi sementara masyarakat dan properti dari lokasi yang terancam bencana.
2. Tahap kedua, Warning (peringatan): tahap ini mengacu pada penyediaan informasi yang efektif dan tepat waktu melalui lembaga-lembaga yang teridentifikasi. Lewat lembaga-lembaga ini, individu dimungkinkan untuk menghadapi bahaya dengan mengambil tindakan menghindari atau mengurangi resiko yang mereka hadapi serta mempersiapkan respons yang efektif.
3. Tahap ketiga, Emergency relief (bantuan darurat): tahap ini merujuk pada penyediaan bantuan atau intervensi selama atau setelah bencana terjadi. Ini merupakan bantuan keselamatan dan memenuhi kebutuhan dasar mereka yang terkena dampak bencana. Hal ini dapat dilakukan segera dan dalam jangka waktu singkat atau durasi yang lama.

4. Tahap keempat, Rehabilitation (rehabilitasi): tahap ini meliputi keputusan dan tindakan yang diambil setelah bencana untuk memulihkan atau mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat yang terkena bencana seperti kondisi sebelum bencana terjadi. Di samping itu, juga digiatkan kembali dan difasilitasi semua penyesuaian yang dibutuhkan untuk mengurangi resiko bencana.
5. Tahap kelima, Reconstruction (rekonstruksi): tahap ini merujuk pada pembangunan kembali kondisi kehidupan masyarakat yang telah rusak akibat bencana dengan tujuan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

Penanggulangan bencana terdapat 4 aktifitas siklus yang sangat penting dilakukan yaitu mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan (Alexander; Coppola; King; Moe & Pathranarakul; Quarantelli dalam Kusumasari, 2014:21):

1. *Mitigasi*

Definisi mitigasi menurut David King (dalam Kusumasari:2014) mitigasi bencana diartikan sebagai suatu langkah yang diambil ketika bencana belum terjadi yang bertujuan mengurangi dampak dari terjadinya bencana terhadap masyarakat dan juga di lingkungan sekitar. Mitigasi bencana dibagi menjadi dua, yaitu mitigasi non-struktural dan mitigasi struktural. Mitigasi non-struktural meliputi pengurangan kemungkinan atau konsekuensi resiko melalui modifikasi proses-proses perilaku manusia atau alam, tanpa membutuhkan penggunaan struktur yang dirancang. Di dalam teknik ini terdapat langkah-langkah regulasi, program pendidikan, dan kesadaran masyarakat, modifikasi fisik nonstruktural, modifikasi perilaku, serta pengendalian lingkungan.

Mitigasi struktural di sisi lain, didefinisikan sebagai usaha pengurangan resiko yang dilakukan melalui pembangunan atau perubahan lingkungan fisik melalui penerapan solusi yang dirancang. Upaya ini mencakup ketahanan konstruksi, langkah-langkah pengaturan, dan kode bangunan, relokasi, modifikasi struktur, konstruksi tempat tinggal masyarakat, konstruksi pembatas atau sistem pendeteksi, modifikasi fisik, sistem (Coppola dalam Kusumasari:2014).

## 2. *Kesiapsiagaan*

Kesiapsiagaan menurut Carter (dalam Cholid:2017) adalah suatu tindakan yang diharapkan mampu ditanggapi oleh masyarakat, pemerintah, organisasi, individu maupun komunitas atas terjadinya bencana secara cepat dan tepat. Adapun yang termasuk ke dalam tindakan kesiapsiagaan yaitu penyusunan rencana penanggulangan bencana, pemeliharaan dan pelatihan personil. Kesiapsiagaan merupakan suatu antisipasi yang dilaksanakan guna meminimalisir korban jiwa, kerugian harta benda serta berubahnya kehidupan masyarakat. Sebaiknya, sebuah kabupaten maupun kota melakukan antisipasi melalui kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan juga merupakan wujud dari kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana baik secara kelompok maupun individu. Kesiapsiagaan juga merupakan bagian dari manajemen bencana secara terpadu.

Menurut Pribadi (2008), kesiapsiagaan adalah tindakan yang terlaksana dalam bentuk suatu antisipasi bencana guna memastikan bahwa tindakan yang terlaksana tersebut dapat diwujudkan secara efektif dan tepat saat terjadi maupun setelah bencana. Kesiapsiagaan adalah

seluruh kegiatan sebelum suatu bencana terjadi yang bertujuan dalam pengembangan kapasitas operasional serta memfasilitasi respon efektif ketika terjadinya bencana. Adapun terjadinya perubahan pandangan terhadap penanggulangan bencana yaitu tidak adanya pemikiran bahwa penanggulangan bencana adalah suatu aksi saat situasi tanggap darurat melainkan lebih memprioritaskan pada tahap prabencana yang memiliki tujuan untuk mengurangi dampak bencana. Sehingga semua aktivitas dalam cakupan pra bencana lebih diutamakan. Adapun kegiatan kesiapsiagaan secara umum yaitu meliputi: kemampuan menilai resiko, perencanaan siaga, mobilisasi sumber daya, pendidikan dan pelatihan, koordinasi, mekanisme respon, manajemen informasi, serta gladi atau simulasi.

Tujuan dari konsep kesiapsiagaan bencana yaitu meyakinkan sistem untuk bencana ini berkecukupan dan memadai, sumber daya dan prosedur berada tepat di tempat kejadian, dan dapat meringankan mereka yang tertimpa bencana, serta memungkinkan mereka untuk menolong diri sendiri. Selain itu kesiapsiagaan bencana diharapkan dapat meminimalisir dampak merugikan melalui tindakan berjaga-jaga yang efektif dan sebagai jaminan secara efisien dan tepat (Kusumasari: 2014).

### 3. *Respons/ Daya tanggap*

Respon adalah tindakan yang dilakukan segera, sebelum, selama, dan setelah bencana terjadi. Fungsi respon tidak hanya untuk membatasi cedera, hilangnya nyawa, serta kerusakan harta benda dan lingkungan, tetapi juga mencakup sistem yang dikembangkan untuk

mengkoordinasikan dan mendukung upaya-upaya tersebut. Respons juga termasuk menghidupkan kembali infrastruktur-infrastruktur penting dengan sangat cepat, misalnya membuka kembali jalur transportasi, pemulihan jaringan komunikasi dan listrik, serta juga memastikan pendistribusian makanan dan air bersih (Djunaedi:2016).

#### 4. Pemulihan

Pemulihan adalah kegiatan mengembalikan sistem infrastruktur kepada standar operasi minimal dan panduan upaya jangka panjang yang dirancang untuk mengembalikan kehidupan ke keadaan dan kondisi normal atau keadaan yang lebih baik setelah bencana. Proses pemulihan dapat dibagi menjadi kegiatan jangka pendek dan jangka panjang. Tahap pemulihan jangka pendek dilakukan segera setelah peristiwa bencana terjadi dengan tujuan menstabilkan kehidupan mereka yang terkena dampak. Kegiatan ini meliputi penyediaan tempat tinggal sementara, distribusi makanan dan air, serta pemulihan infrastruktur penting. Sedangkan kegiatan pemulihan jangka panjang tidak dimulai sampai fase darurat bencana berakhir, yaitu di saat masyarakat mulai merehabilitasi dan membangun kembali. Jenis-jenis pemulihan meliputi bantuan publik, pemulihan perumahan, dan pemulihan budaya (Munir:2017).

#### 5. *Pariwisata-Bencana*

Pariwisata berbasis bencana adalah salah satu program yang signifikan dalam gerakan rekonstruksi yang dilakukan oleh para korban bencana dan wisatawan. Program ini mengindikasikan adanya kemungkinan kontribusi terhadap sektor industri pariwisata yang dapat

memulihkan dan meningkatkan pendapatan ekonomi pascabencana (Nagai, 2012). Istilah pariwisata bencana (*disaster tourism*) masih erat kaitannya dengan *thanatourism* atau *dark tourism*, yaitu kegiatan pariwisata yang dilakukan ke tempat-tempat yang pernah terjadi bencana alam, korban perang, bencana buatan, situs kematian maupun tempat-tempat mengerikan lainnya yang dipandang memiliki nilai pariwisata yang unik dan memiliki fungsi sebagai sarana pembelajaran dari masa lalu untuk menghindari kejadian atau bencana serupa di masa mendatang (Vacation Ideas, 2012). Tantangan dan peluang yang muncul dengan adanya pariwisata bencana ini adalah penguatan kapasitas dan kesadaran masyarakat melalui pemberdayaan berbasis masyarakat yang di dalamnya terdapat berbagai program penanggulangan bencana seperti mitigasi dan edukasi dalam bentuk terobosan baru.

Bencana sebagaimana diungkapkan oleh Priambodo (2009) diartikan sebagai kejadian alam, buatan manusia atau perpaduan antara keduanya yang terjadi secara tiba-tiba sehingga menimbulkan dampak negatif yang dahsyat bagi kelangsungan kehidupan. Berdasarkan kepada pemahaman tersebut di atas maka terdapat tiga unsur dalam bencana, yaitu: *Pertama*, adanya peristiwa baik itu yang ditimbulkan oleh alam maupun oleh manusia. *Kedua*, waktu terjadinya tiba-tiba. *Ketiga*, adanya keberlangsungan hidup yang terganggu, ketiga unsur tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Lebih lanjut Priambodo (2009) mengemukakan bahwa bencana dikelompokkan kedalam 3 (tiga) jenis, yaitu: bencana alam, bencana sosial dan bencana kompleks. Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa bencana dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: bencana alam, bencana non-alam dan bencana sosial (Pemerintah Indonesia, 2007).

Berdasarkan kepada pemahaman tersebut maka wabah COVID-19 dikategorikan sebagai bencana non-alam, hal ini didukung dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang menyatakan COVID-19 sebagai bencana non-alam. Menurut para ahli disebutkan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu: (a) pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; (b) perlindungan masyarakat dari dampak bencana; (c) penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; (d) pemulihan kondisi dari dampak bencana; (e) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai; (f) pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; (g) pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Berdasarkan kepada aturan perundang-undangan tersebut maka penanggulangan bencana COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana nasional maka upaya penanggulangannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang meliputi proses penanggulangan dampak bencana sampai dengan proses pemulihan bencana. Meskipun demikian diatur pula tanggung jawab pemerintah daerah sampai dengan kewajiban masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui undang-undang tersebut. Kesiapsiagaan bencana oleh Carter (2008) diartikan sebagai tindakan yang memungkinkan pemerintah, organisasi, masyarakat, komunitas dan individu untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana secara cepat dan tepat guna.

Didasarkan kepada pemahaman tersebut maka adanya bencana harus ditanggulangi segera dengan tujuan selain meminimalisir dampak lanjutan juga sebagai upaya untuk mengembalikan keadaan ke kondisi awal, menurut Nurjanah (2012) bahwa upaya penanggulangan bencana disebut dengan manajemen bencana yang dapat

diartikan sebagai proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen bencana seperti *planning, organizing, actuating dan controlling*.

Pengertian pemulihan bencana menurut Coppola (2007) diartikan sebagai;

*“Fungsi manajemen darurat dimana negara, komunitas, keluarga, dan individu memperbaiki, merekonstruksi, atau mendapatkan kembali apa yang telah hilang sebagai akibat dari bencana”*

Pengertian tersebut juga sejalan dengan pemahaman tersebut Haas, Kates, & Bowden (1977) menyatakan bahwa:

*“Pemulihan dapat diprediksi, terdiri dari bagian-bagian yang dapat diidentifikasi yang terjadi secara berurutan; pilihan dan keputusan didorong oleh nilai dan hasil menekankan kembalinya ke normal atau penggabungan tindakan-tindakan yang baru-baru ini dikaitkan dengan keberlanjutan.”*

Berdasarkan pemahaman tersebut di atas maka pemulihan bencana merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi ke awal atau semula sebelum adanya bencana. Dengan demikian, pemulihan bencana Covid-19 merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi ke awal atau semula sebelum adanya bencana. Apabila dikaitkan dengan pariwisata, pemulihan pariwisata juga dimaksudkan sebagai upaya mengembalikan pariwisata ke kondisi awal sebelum ada pandemi Covid-19. Kemenparekraf menyatakan bahwa terdapat tiga fase untuk menyelamatkan pariwisata akibat pandemi Covid-19, yaitu tanggap darurat, pemulihan, dan normalisasi. Penjabarannya adalah sebagai berikut:

1. Fase Tanggap darurat

Pada fase ini, daerah wisata difokuskan pada kesehatan di mana para pelaku wisata tersebut dapat menginisiasi program perlindungan sosial, mendorong kreativitas dan produktivitas para pelaku industri wisata sehingga mereka dapat melakukan koordinasi krisis pariwisata dengan daerah pariwisata. Pada fase tanggap darurat ini diharapkan masyarakat

sekitar desa wisata dapat melakukan inovasi dan menyusun kreativitas bagaimana agar desa wisata tersebut dapat bertahan hingga akhirnya dapat menyiapkan pemulihan.

## 2. Fase Pemulihan

Fase pemulihan dilakukan pada saat pembukaan secara bertahap tempat wisata. Adapun persiapannya mulai dari penerapan protokol cleanliness (kebersihan), health (kesehatan), safety (keamanan), dan environment (ramah lingkungan) (CHSE) di tempat wisata hingga mendukung optimalisasi kegiatan *meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE)*. kunci utama pemulihan pariwisata meliputi inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Inovasi berkaitan dengan perubahan mendasar yang harus diupayakan. Inovasi harus dilakukan dari segi infrastruktur, kelembagaan, budaya, kuliner hingga fesyen yang berkaitan dengan pariwisata. Adaptasi berarti menyesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. Sementara kolaborasi adalah semua pihak harus bekerja sama dan bersinergi untuk mengembalikan kondisi pariwisata seperti sebelum Covid19.

## 3. Fase Normalisasi

Fase ini adalah persiapan destinasi dengan protokol CHSE, meningkatkan minat pasar, hingga diskon untuk paket wisata dan MICE (Kemenparekraf/Baparekraf RI, 2021a).

## **G. Definisi Konseptual**

Adapun defnisi konsepsional dalam penelitian ini tersusun sebagai berikut:

1. Pariwisata, merupakan suatu jenis industri yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat guna untuk memanfaatkan Potensi

wisata yang ada. Pariwisata tidak hanya dikelola berdasarkan keinginan saja, akan tetapi keberadaan Pariwisata di Indonesia sudah di akui sebagai Industri, dan di kelolah berdasarkan undang-undang pariwisata yang dibuat oleh pemerintah.

2. Bencana, merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Empat (4) aktifitas siklus dalam penanggulangan bencana yaitu mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan.
3. Pemulihan, merupakan fungsi manajemen darurat dimana negara, komunitas, keluarga, dan individu memperbaiki, merekonstruksi, atau mendapatkan kembali apa yang telah hilang sebagai akibat dari bencana yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi ke awal atau semula sebelum adanya bencana. Yang diperlukan dalam pemulihan: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian.
4. Desa Wisata, merupakan suatu bentuk penggabungan akomodasi, atraksi dan fasilitas penunjang ke dalam suatu sistem kehidupan masyarakat menjadi suatu sistem kehidupan masyarakat dengan aturan dan tradisi yang berlaku.
5. Pariwisata Bencana, merupakan suatu kejadian yang tidak dapat dilepaskan dengan kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun masyarakat. Bencana dapat disebabkan oleh faktor alam dan faktor non alam seperti akibat kegagalan teknologi dan ulah manusia.

## H. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian menurut Sugiyono (2015, h.38) adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Singkatnya, definisi operasional merupakan petunjuk yang mengukur indikator, sehingga garapan penelitian ini dapat menjadi lebih jelas dan lebih terarah. Oleh karena itu, penulis membuat daftar definisi operasional sebagai berikut:

**Tabel 2. Daftar rincian definisi operasional**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Parameter</b>
<i>Pemulihan</i> desa wisata Nglinggo di masa pandemi Covid-19	1. Kesiapan Tanggap darurat	- penyuluhan terhadap kebijakan new normal di masa pandemi covid-19 - penyediaan sarana pra sarana penunjang protokol kesehatan - pemberlakuan jam operasional sesuai standar kebijakan di masa pandemi - pembatasan jumlah wisatawan per hari
	2. Kesiapan Pemulihan	- Akses untuk memasuki Desa Wisata di masa pandemi secara bertahap - Aktivitas kembali dengan

		<p>penerapan protokol kesehatan; social distancing, penggunaan masker, handsanitizer, pengecekan suhu</p> <p>- Kontrol atas partisipasi masyarakat di desa wisata dengan penerapan kebijakan new normal</p>
	<p>3. Kesiapan Normalisasi</p>	<p>- Adaptasi kebiasaan baru selama kegiatan di desa wisata menurut kebijakan new normal</p>

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah langkah yang dilakukan oleh peneliti yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data atau informasi apa saja berkaitan dengan penelitian, serta melakukan serangkaian pengelolaan data yang telah didapatkan agar mendukung terwujudnya tujuan dari sebuah penelitian. Metode penelitian dilaksanakan untuk memberikan gambaran rancangan tentang penelitian yang meliputi antara lain: prosedur atau apa saja langkah-langkah yang harus ditempuh oleh peneliti, waktu penelitian, asal sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Nasir menjelaskan bahwa metode dari penelitian ialah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan & menentukan jawaban atas masalah yang diajukan (Hidayat, 2017). Metode penelitian dijabarkan secara rinci yakni; jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sherman dan Webb (1988) berkaitan dengan makna seperti yang tampak, atau dicapai oleh orang-orang dalam situasi sosial yang hidup (Sherman & Webb, 1988). Sedangkan Bogdan dan Biklen (1982) menyatakan bahwa penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang datanya dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka (Bogdan & Biklen, 1982). Data berupa kutipan dari dokumen, catatan lapangan, dan wawancara atau kutipan dari kaset video, kaset audio, atau komunikasi elektronik digunakan untuk mempresentasikan temuannya dari studi. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang hasil penelitiannya didapat bukan melalui hitungan atau statistik yang berusaha memahami dan menafsirkan makna dari peristiwa interaksi manusia pada suatu keadaan tertentu menurut pandangan pribadi peneliti dan dalam *natural setting*. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*).

### **b. Objek Penelitian**

Penelitian tentang “Pemulihan Pariwisata Desa Wisata Nglinggo Pada Masa Pandemi Covid-19” dilakukan di Desa Panggerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana desa wisata mengupayakan pemulihan pariwisata dengan cara pengembangan masyarakat desa.

### **c. Sumber Data**

Kata-kata dan tindakan individu-individu yang diamati atau diwawancarai adalah sumber data utama (primer), selain itu adalah data tambahan yang berupa dokumen. Dalam hal ini pembagian jenis data yaitu meliputi kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik (Lofland & Lofland dalam Moleong, 2007).

**Tabel 3 Sumber Data**

No	Jenis Data	Sumber
1	Data Primer	Hasil wawancara pelaku pariwisata desa nglingsgo.
2	Data Sekunder	Dokumen-dokumen yang diperoleh dari studi pustaka

i. Data Primer

Sarwono dalam Kusumastuti & Khoirin (2019) menjelaskan data primer adalah data berupa tulisan hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya dimana data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti. Kemudian menurut Hardani et al. (2017) data primer pada penelitian merupakan data yang didapat langsung dari sumbernya dengan melakukan pengukuran, menghitung sendiri dalam bentuk angket, observasi, wawancara dan lain sebagainya..

ii. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen yang memuat keadaan konsep penelitian di dalam unit analisa yang dijadikan sebagai objek penelitian. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang berupa laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka. Menurut Sarwono dalam Kusumastuti & Khoirin (2019) data sekunder merupakan data berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh peneliti dengan membaca, melihat atau mendengarkan.

#### **d. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### **i. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan antara pihak pewawancara atau interviewer dengan mengajukan sebuah pertanyaan kepada pihak yang diwawancara atau narasumber yang memberikan sebuah jawaban atas pertanyaan pewawancara (Moleong 2007). Wawancara adalah teknik yang memungkinkan dalam mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dalam menunjang penelitiannya. Dalam penelitian ini peneliti berfokus untuk menggali data atau informasi dari Desa Wisata Nglingsgo.

##### **ii. Observasi**

Observasi adalah teknik yang digunakan dalam pengumpulan data berupa pengamatan langsung di lapangan yang kemudian dicatat secara sistematis terkait subyek atau obyek yang diamati. Dalam hal ini peneliti akan melakukan pengamatan di beberapa lokasi yang berkaitan dengan upaya pemulihan pariwisata.

##### **iii. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dapat berupa jurnal-jurnal, buku-buku, *website* pemerintah, atau peraturan sehingga data yang didapat lebih akurat.

#### e. **Teknik Analisis Data**

Analisa data dilakukan setelah peneliti selesai dalam melaksanakan pengumpulan data di lapangan. Kemudian analisis data yang dilakukan berpedoman pada langkah-langkah yang ditempuh pada suatu penelitian kualitatif (Bodgan & Biklen dalam Moleong, 2007).

Teknik analisis data menurut Miles & Huberman dalam Gunawan (2013) yaitu meliputi, Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis data interaktif yang melalui beberapa langkah yaitu:

##### i. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal utama, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya yang berkaitan dengan masalah penelitian, kemudian dikelompokkan sesuai dengan topik masalah

##### ii. Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan informasi secara tersusun yang memungkinkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Agar dapat melihat dari gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian maka data yang diperoleh dapat disajikan dalam uraian, matriks, network, chart atau grafik, dan lain sebagainya.

##### iii. Penarikan Kesimpulan

Penarikan simpulan adalah berupa hasil penelitian sebagai jawaban atas fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Penyajian kesimpulan adalah dalam bentuk deskriptif obyek yang diteliti dengan berpedoman pada kajian penelitian.